

Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik

ISSN: 2088-1274

Vol. 1 | No. 1

Budaya Politik kaum tradisional pada Mukhtamar NU ke 33 di Jombang

Yulyanah*

* Universitas Bung Karno, Jakarta

Article Info	Abstract
Keywords: Cultural politics, Transmitting values, Religious communications, Nahdlatul Ulama.	<i>Traditional and Cultural Politics is the meaning contained in the behavior patterns of human values, properties, both are as morality, ideology, beliefs, social systems, social and religious organizations. Nahdlatul Ulama is the religious life, the transmission of religious values through scholarly tradition and tradisional educations in the true sense of transmitting a kegenerasi next generation. Tahlil is a tool of mediation (intermediary) as a medium of religious communication and unifying the people. KH. Ma'ruf Amin are elected from nine Ahwa who got most of the forum proposed Syuriah vice Rois Syuriah, but the NU congress announced by the decline of Gus Mus then KH. Ma'ruf Amin became Chairman Rois Aam Syuriah Nahdlatul Ulama period 2015-2020.</i>
Corresponding Author: Yuly28@gmail.com	Politik tradisional dan Budaya adalah makna yang terkandung dalam pola perilaku nilai-nilai kemanusiaan, sifat, keduanya moralitas, ideologi, keyakinan, sistem sosial, sosial dan organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama adalah kehidupan beragama, transmisi nilai-nilai agama melalui ilmiah tradisi dan tradisional pendidikan dalam arti sebenarnya dari transmitting sebuah kegenerasi generasi berikutnya. Tahlil adalah alat mediasi (perantara) sebagai media komunikasi agama dan mempersatukan people. KH. Ma'ruf Amin dipilih dari sembilan Ahwa yang mendapat sebagian forum yang diusulkan Syuriah wakil Rois Syuriah, tetapi NU kongres diumumkan oleh penurunan Gus Mus kemudian KH. Ma'ruf Amin menjadi Ketua Rois Aam Syuriah Nahdlatul Ulama periode 2015-2020.
Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015 ISSN 2088-1274 hh. 31-42 ©2015 MJP. All rights reserved.	

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama disingkat (NU) adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang beraqidah Islam menurut faham Ahlul sunnah wal

Jama'ah. Secara syari'ah (fiqh) NU menganut salah satu madzhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal 16 rajab

1344 H, bertepatan dengan 31 Januari 1926 untuk waktu tak terbatas (PBNU, 1986).

Secara bahasa, ahlussunnah berarti penganut Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan ahluljamaah berarti penganut l'tiqad jamaah para sahabat Nabi. Jadi, ahlussunnah wal jamaah (aswaja) adalah kaum yang menganut l'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya (Sekretaris Jendral PBNU, 2008).

Tradisional dan Budaya Politik adalah makna yang terkandung dalam pola perilaku nilai manusia, sifat, baik merupakan sebagai moral, ideologi, keyakinan, sistem sosial, organisasi sosial maupun religi. Sebagai entitas tersendiri dalam sebuah tradisi dan budaya politik dikalangan kaum Nahdliyin. Namun demikian harus disadari bersama pemahaman dan pengenalan Ahlusunnah Waljamaah (Aswaja) mulai dari dini, yakni pengenalan tersebut dimulai dari keluarga, sanak saudara, tetangga, kerabat, sekolah, dan masyarakat umum.

Aktualisasi aswaja berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya menjadi pedoman normatif belaka. Selama

ini pengertian aswaja tidak dimaknai secara komprehensif, bahkan sering diartikan secara sempit. Sempit disini menggambarkan masyarakat hanya berpaku kepada aspek aqidah saja dan itupun dengan pemahaman yang dangkal. Paham aswaja yang terdiri dari tiga unsur yakni, aqidah, syariah atau fiqh dan ahlaq atau tasawuf.

Paham Tradisional Nahdlatul Ulama

Tradisional Nahdlatul Ulama adalah kehidupan keagamaan, transmisi nilai-nilai keagamaan melalui tradisi keserjanaan dan pendidikan. Tradisional dalam arti yang sebenarnya melakukan transmisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi tradisional NU dalam bidang pendidikan dan keagamaan bukan berarti buta terhadap era globalisasi seperti sekarang ini. Namun wawasan dan pemahaman dipelajari dan ditransmisikan ke dalam yang bersifat tradisional. Sistem ideal dimana individu harus bisa menyesuaikan dalam realita dan kehidupan sosial.

Aswaja ialah pemurnian terhadap "sunnah" sedangkan lawannya ialah ahlul bid'ah. Dari dua

pemahaman ini ada yang bersifat istilabi dan yang bersifat substantif. Artinya dalam istilah Ahlussunnah waljama'ah ada aspek jauhar atau hakekat, ada aspek ard atau formal. Aspek yg paling mendasar adalah aspek jauharnya, sedangkan aspek ardnya bisa mengalami revitalisasi dan pembaruan karena terkait dengan factor sejarah. Aswaja secara substantif adalah kelompok yang setia terhadap sunnah, dengan menggunakan manhaj berpikir mendahulukan nash dari pada akal.

Bid'ah ditinjau dari aspek kajian ushul fiqh menjadi dua bagian diantaranya; Pertama, Bid'ah meliputi segala yang diadakan dalam bidang ibadah saja, yakni segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, yang dipandang menyamai syari'at agama, dan mengerjakannya secara berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kedua, Bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adkan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah maupun urusan adat (Aceng, et al, 2008).

Sedangkan dari aspek fikih, bid'ah adalah perbuatan tercela

yang diada-adakan dan bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, maupun ijmak. Bid'ah inilah yang dilarang oleh ajaran Islam. "Ada nuansa yang membedakan antara kelompok Tradisional-Asy'ariyah dan kelompok moderat-Maturidiyah. Yaitu dalam hal akal, karena agi kelompok tradisional – Asy-ariyah, akal hampir sama sekali tidak memiliki daya dan otoritas, tetapi kelompok Maturidiyah mengakui adanya daya dan otoritas, tetapi kelompok Maturidiyah mengakui adanya daya dan otoritas akal namun tidak setinggi paham liberal".

Peran Nahdlatul Ulama Dalam Bidang Politik

Menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman Nahdlatul Ulama, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Nahdlatul Ulama sejak berdiri memang melakukan aktivitas politik, terutama dalam pengertian yang pertama, yakni politik kebangsaan, karena Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, tercatat bahwa Nahdlatul Ulama selalu memperjuangkan keutuhan NKRI. Selain dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islam-an, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama juga didasari oleh nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi. Politik jenis kedua yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama yaitu politik kerakyatan. Politik kerakyatan bagi Nahdlatul Ulama sebenarnya adalah perwujudan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada penguasa untuk membela rakyat. Hal itulah yang kemudian diambil alih oleh generasi muda Nahdlatul Ulama melalui LSM-LSM, ketika melihat Nahdlatul Ulama secara struktural kurang peduli terhadap permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil (Alfian, 1983).

Nahdlatul Ulama juga menjalankan politik jenis ketiga, yaitu politik kekuasaan atau yang lazim disebut politik praktis. Politik kekuasaan merupakan jenis politik yang paling banyak menarik perhatian orang Nahdlatul Ulama. Dalam catatan sejarah, terlihat bahwa Nahdlatul Ulama pernah

mendapatkan kesuksesan dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pada saat itu, dalam waktu persiapan yang relative sangat pendek, Partai Nahdlatul Ulama yang baru keluar dari Masyumi dapat menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi yang sangat siap waktu itu. Disusul pada pemilu pertama orde baru pada tahun 1971, dimana Partai Nahdlatul Ulama menduduki posisi kedua setelah Golongan Karya.

Sejak saat itu banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang terjun ke dunia politik praktis. Hal ini membawa dampak negatif pada aktivitas penting Nahdlatul Ulama lainnya seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan dakwah yang menjadi terbengkalai. Selanjutnya dalam merespon perkembangan politik pada masa reformasi, Nahdlatul Ulama memfasilitasi pendeklarasian sebuah partai politik. Pendeklarasian partai tersebut bertujuan untuk menyalurkan dan memproses warga nahdliyin yang ingin berkiprah dalam politik praktis agar menjadi politisi sejati, yang pada gilirannya menjadi negarawan. Pada sisi lain, Nahdlatul Ulama memberikan kebebasan pada

warganya untuk memasuki partai politik manapun yang diyakininya dapat menjadikan dirinya sebagai politisi sejati dan negarawan. Dengan catatan senantiasa mengacu pada etika berpolitik nahdliyin yang didasarkan pada nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama"ah dan tidak kehilangan kesetiaan kepada cita-cita dan kepentingan Nahdlatul Ulama

Struktural Organisasi NU

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam angka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Susunan dan Perangkat Organisasi.

Muktamar dalam pemahaman NU adalah forum permusyawaratan tertinggi di Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) forum yang membicarakan dan mengkaji kebijakan organisasi masyarakat yang sudah ada sejak 1926. Muktamar NU ke-33 Jombang yang dihadiri kurang lebih 4000 muktamirin dari Syuriyah dan Tanfiziyah wilayah, cabang seluruh Indonesia. Susunan organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Ranting. Mempunyai perangkat organisasi diantaranya Lajnah, Lembaga, dan Badan Otonom.

Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus. Diantaranya Lajnah Falakiyah, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lajnah Waqfiyah Nahdlatul Ulama, Lajnah Penyuluhan dan bantuan Hukum, Lajnah Zakat, Infaq

dan Shadaqoh dan Lajnah Bahstul Masail Diniyah.

Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Yakni Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga social Mabarroth, Lembaga Perekonomian, Lembaga pembangunan dan pengembangan pertanian, *Rabitha Ma'ahid al-Islamiyah*, Lembaga kemaslahatan Keluarga, Haiah Ta'miril Masjid, Lembaga misi Islam, Ikatan seni Hadrah, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, dan Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa.

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khusu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Yakni: Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Putra NU, Ikatan Putri-putri NU, *Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mutabarah An Nahdliyah*, *Jam'iyatul Qurrawal Huffadz*, Persatuan Guru NU, dan

Ikatan Sarjana Islam Indonesia (PBNU, 1986).

Dari lembaga, Lajnah, dan Banom Nahdlatul Ulama memberikan program-program yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sistem kerja maupu masukan yang bersifat membangun kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk dapat dikaji bersama. Lembaga, Lajnah, dan Banom tidak bisa menjadi peserta maupun utusan untuk dapat memilih Calon Ketua Syuriah maupun Calon Ketua Tanfidziyah NU. Ini didasarkan pada aturan yang sudah ada pada Angaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

Kesejukkan Dalam Membacakan Tahlil dan Sholawat Nabi.

Dalam Rancangan Tata Tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Jombang, 1-5 Agustus 2015 membuat situasi alun-alun Jombang gemah gempita oleh lalu lalangnya argumentasi dari peserta muktamirin. Beberapa utusan dari wilayah Provinsi yang mewakili peserta utusan ingin mencoba mengungkapkan apa yang menjadi pertanyaan tentang pembahasan Tatib tersebut. Minggu, 2 Agustus 2015 bertepatan dengan

pembahasan Rapat Pleno 1 dipimpin oleh Slamet Efendi Yusuf merangkap sebagai Ketua Pelaksana Panitia Muktamar NU, rapat pleno tersebut yang seharusnya dimulai pada jam 10 pagi mundur menjadi jam 13 siang. Disini keterlambatan karena registrasi yang belum selesai dan adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh peserta muktamirin. Hal ini menjadi perdebatan antara panitia dan peserta.

Peserta muktamar merasa tidak diindahkan oleh panitia sehingga perdebatanpun semakin memanas, dengan spontan para Kyai melantunkan Sholawat dan tahlil untuk menyejukan suasana yang sedang tidak terkendali. Tahlil dan Sholawat bagi kaum nahdliyin adalah dzikir yang paling ampuh untuk meredam suasana. Tahlil adalah bacaan *Laillah haillloh* penyebutan istilah dari sastra Arab disebut menyebutkan dengan istilah *Ziqruhuzro warodatulqul* (menyebutkan sebagian) tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Tahlil adalah sebagian dari berbagai macam dzikir yang dibaca pada acara tersebut.

Manfaat tahlil yakni sebagai iktiyar (usaha) bertaubat kepada Allah SWT untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal dunia. Merekatkan tali persaudaraan antar sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mengingatkan kita pada akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Manusia yang selalu bergelut dengan materi tentu memerlukan kesejukan rohani salah satunya dengan dzikir. Budaya tahlil memiliki sandaran yang kokoh dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena tidak ada butir-butir upacara tahlil bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tahlil merupakan alat mediasi (perantara) sebagai media komunikasi keagamaan dan pemersatu umat. Ini didasarkan pada: **Kesatu**, Secara historis, keberadaan Tahlil di Indonesia sudah ada jauh sebelum munculnya berbagai organisasi keagamaan, baik yang mendukung tahlil ataupun yang menolaknya. Awalnya, tradisi yang sarat dengan dengan warna tasawwuf dilakukan dipesantren dan kraton, namun kemudian lambat laun diterima dan diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia

sehingga menjadi tradisi keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. **Kedua**, Munculnya konflik atas penerimaan tahlil oleh berbagai kelompok yang menolaknya, sebenarnya hanya terjadi pada tingkat elit kelompok tersebut. Sementara di tingkat bawah, tradisi tahlil ini tetap dilakukan tidak hanya masa organisasi yang membolehkan tahlil, tapi juga anggota organisasi yang membida'ahkan tahlil. **Ketiga**, Tahlil merupakan sebuah tradisi yang memiliki dimensi ketuhanan (*hablumminalloh*) yang mampu memberikan siraman rohani, ketenangan, kesejukan hati dan peningkatan keimanan. Sekaligus juga memiliki dimensi social (*hablumminannas*) yang mampu menumbuh rasa persaudaraan, persatuan dan kebersamaan. Keyakinan seperti ini jelas diungkapkan oleh masyarakat muslim dari berbagai golongan baik kaum konservatif, modernis, maupun abangan. **Keempat**, Tahlil adalah persoalan Khilafiyah sehingga seharusnya tidak menjadi penghalang akan kebersamaan dan persatuan dan kebersamaan umat Islam terutama untuk menegakkan Ukhuwah Islamiyah (Muhyiddin,

1981). Kisruhnya pembahasan tatib membuat mundur menjadi jam 14.00, setelah SC menutup perdebatan peserta, barulah panitia memberikan copy tata tertib muktamar kepada peserta muktamirin.

Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yang menjadi perdebatan.

Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. 3736/A.II.03/06/2015 tentang bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang dituangkan dalam Bab II pasal 2 yakni jumlah dan kreteria *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang disertakan dengan ayat (1) *Ahlul Halli Wal Aqdi* untuk menunjuk Rois'Am dan calon Ketua Umum terdiri dari ulma/kyai yang berjumlah Sembilan (9) orang.(2) *Ahlul Halli Wal Aqdi* untuk menunjuk Rois dan Calon ketua di tingkat Pengurus Wilayah terdiri dari ulama/kyai yang berjumlah tujuh (7) orang.

Syuriyah adalah pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai Pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas; **Pertama**, Menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan

usaha dan tindakannya untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama.

Kedua, Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah Waljama'ah, baik dibidang aqidah, syariah, maupun ahlaq/tasawuf.

Ketiga, Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat Nahdlatul Ulama agar pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama berjalan di atas ketentuan jami'iyah dan agama Islam.

Keempat, Membimbing, mengarahkan dan mengawasi badan-badan otonom yang langsung berada di syuriah;

Kelima, Menerima dan membahas laporan dari pengurus Besar Tanfiziyah secara periodic setiap 6 bulan.

Keenam, Apabila keputusan perangkat Nahdlatul Ulama dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah waljama'ah. Pengurus Syuriah atas keputusan rapatnya dapat membatalkan keputusan ataupun langkah perangkat tersebut.

Pada pembahasan tata tertib yang sangat alot dan menyita waktu, tenaga, dan pikiran hanya semata-

mata membahas Bab VII pasal 19 mengenai Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum. Yang menjadi perdebatan tersebut masuk daam ayat¹ yakni Pemilihan Rois Aam dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Pasal ini yang menjadi munculnya suka atau tidak suka dengan pembahasan Ahwa, Ahwa yang sudah dibahas dalam Munas dan sudah dituangkan dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama kan di batalkan. Ini menjadi polemik bagi muktamirin yang hadir. Rais Aam diijelaskan dalam Bab III Tugas dan Wewenang Anggota Pengurus Besar Syuriah pada pasal 5 dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Nahdlatul Ulama mengenai Rais Aam adalah;

Pertama, Memimpin, mengatur dan mengawasi kebijaksanaan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama khususnya yang menyangkut tugas-tugas Syuriah;

Kedua, Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas diantara pengurus besar Syuriah; dan

Ketiga, Memimpin rapat Pengurus Besar Harian Syuriah, Pengurus Besar Lengkap Syuriah, dan Pengurus Besar Pleno.

Pencetus teori modernisasi dari Karl Max sampai Daniel Bell (1973, 1976) berpendapat bahwa munculnya masyarakat industri berkaitan dengan pergeseran budaya yang menjauh dari sistem-sistem nilai tradisional, fakta bahwa kedua klaim tersebut benar adanya: 1) Pembangunan berkaitan dengan sebuah sindrom perubahan-perubahan yang dapat diramalkan yang menjauh dari norma-norma sosial yang mutlak, dan menuju nilai-nilai yang semakin rasional, toleran, bisa dipercaya, dan pasca modern; 2) Tetapi budaya merupakan jalan kepercayaan. Fakta bahwa sebuah masyarakat yang secara historis Protestan, Ortodoks, Islam, Konghucu, memunculkan wilayah-wilayah budaya dengan sistem-sistem nilai yang sangat berbeda yang bertahan di saat kita memeriksa akibat-akibat pembangunan ekonomi.

Huntington (1993, 1996) berpendapat bahwa dunia terbagi dalam delapan atau Sembilan peradaban besar berdasarkan langgengnya perbedaan-perbedaan budaya yang berlangsung selama berabad-abad-dan bahwa konflik-konflik masa depan akan terjadi

sepanjang jalur patahan budaya yang memisahkan peradaban-peradaban ini. Peradaban ini umumnya dibentuk oleh tradisi-tradisi keagamaan yang masih kuat hingga sekarang, sekalipun ada tekanan modernisasi.

Oleh karena itu kericuhan yang terjadi di alun-alun Jombang hanya karena Gus Ipul (Syaifulloh Yusuf) sebagai ketua panitia daerah Muktamar NU ke-33 Jombang, di hadapan muktamirin dan Rais Syuriah mengenai mundurnya Gus Mus (Mustopa Bisri) adalah bentuk dari akhlakul karimah. Gus Mus yang terpilih dari Sembilan Ahwa sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2015-2020 tidak bersedia dipilih kembali.

KH.Ma'ruf Amin yang terpilih dari Sembilan Ahwa yang mendapat usulan terbanyak dari forum Syuriah menjadi wakil Rais Syuriah, namun muktamar NU mengumumkan dengan kemunduran Gus Mus maka KH.Ma'ruf Amin menjadi Ketua Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Pembahasan Ahwa yang dibahas oleh peserta utusan yang dibagi dalam berbagai

komisi-komisi masih bersitegang dengan keputusan pasal yang menyebutkan Ahwa.

Penutup

Umat Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Tanah Air. Demikian juga dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia sejak dilahirkan pada 1926 hingga sekarang. NU adalah sebuah organisasi (jam'iyah) yang didirikan oleh para ulama dan mengumpulkan komunitas umat Islam (jamaah) dengan berbagai karakteristik khusus yang dimiliki.

Kekhasan yang dimiliki NU menjadi modal utama dalam mencirikan dirinya di tengah pluralitas bangsa. Corak NU yang dikenal tradisional (menghargai tradisi) moderat, toleran, sekaligus mengutamakan keselarasan ini telah menjadi salah satu warna dari umat Islam Indonesia yang lebih majemuk. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berdasarkan kepada Pancasila. Wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap

langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI Di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapitalisme.

Merespon berkembangnya upaya menumbuhkan federalisme yang bertujuan mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi, NU merasa perlu untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan Indonesia dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Muktamar NU ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004. Kedaulatan dan keutuhan NKRI seringkali terancam dengan munculnya berbagai gerakan separatisme di berbagai tempat di Indonesia, misalnya adalah yang terjadi di Aceh dan Papua. Menanggapi hal ini, para kiai NU mengadakan Bahtsul Masa'il tentang gerakan separatisme. Dari perspektif konsep bughat dalam fikih, para ulama NU menyimpulkan bahwa separatisme itu memang

tidak dibenarkan. Dalam fikih, gerakan separatisme menurut ulama NU, sering disebut dengan alkhuruj 'an al-imam (membangkang terhadap penguasa)

Daftar Pustaka

- Alfian. 1983. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Harrison, Lawrence E. dan Samuel P. Huntington. 2006. *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfoedz, Maksoem. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Ummat.
- Thahir, H. Anas. 1980. *Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- PBNU. 2010. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*.
- Thoha, HM. As'ad. 2006. *Pendidikan Aswaja dan ke-NU-AN untuk Madrasah Aliyah SMA/SMK Kelas II*. Surabaya: Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur.
- Sekretariat Jendral PBNU. 1986. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Nahdlatul Ulama*. PBNU
- Sekretariat Jendral PBNU. 2008. *Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa*. PBNU
- Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, Zamzami Afwan Faizin, Sulthon Fathoni, Sholtunul Huda. 2008. *Islam Ahlusunnah Waljama'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nadlatul Ulama.
- Abdusshomad, Muhyiddin. 1981. *Tahlil dalam Perspektif Al-qur'an dan As-Sunnah (kajian kitab kuning)*. PP Nurul Islam.